

Agrinimal

Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2012

BUNGKIL KELAPA SUMBER *MEDIUM CHAIN FATTY ACID* DALAM
PAKAN RUMINANSIA SEBAGAI AGENSIA PENURUN GAS METAN
PADA FERMENTASI RUMEN SECARA *IN VITRO*

Erwin Hubert Barton Sondakh, Lies Mira Yusiati, Hari Hartadi, Edi Suryanto

ANALISIS PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN DI
PEDESAAN MALUKU (STUDI KASUS DI DESA LOHIATALA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU)

Wardis Girsang

PERTUMBUHAN PEDET SAPI BALI LEPAS SAPIH YANG DIBERI
RUMPUT LAPANGAN DAN DISUPLEMENTASI DAUN TURI
(*Sesbania grandiflora*)

Imran, S. P. S. Budhi, Nono Ngadiyono, Dahlanuddin

SIFAT KUANTITATIF AYAM KAMPUNG LOKAL PADA
PEMELIHARAAN TRADISIONAL

Rajab, Bercomin J. Papilaya

PENGARUH JUS DAUN SIRIH (*Piper betle* Linn) SEBAGAI BAHAN
PRACURING TERHADAP KUALITAS MIKROBIOLOGIS DAN
SENSORIS DENDENG AYAM PETELUR SELAMA PENYIMPANAN

A.T.D. Indriastuti, Setiyono, Yuny Erwanto

ENDOPARASIT DALAM FESES BANDIKUT (*Echymipera kalubu*)
(STUDI AWAL KEJADIAN ZONOSIS PARASITIK DARI SATWA LIAR)

Priyo Sambodo, Angelina Tethool

UKURAN SALURAN REPRODUKSI AYAM PETELUR FASE PULLET
YANG DIBERI PAKAN DENGAN CAMPURAN RUMPUT LAUT
(*Gracilaria edulis*)

Wiesje Martha Horhoruw

Agrinimal

Vol. 2

No. 2

Halaman
39 - 80

Ambon,
Oktober 2012

ISSN
2088-3609

ANALISIS PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN DI PEDESAAN MALUKU (STUDI KASUS DI DESA LOHIATALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU)

Wardis Girsang

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Ambon 97233
Email: girsangwardis@yahoo.com

ABSTRAK

Walaupun kajian kemiskinan sudah banyak dilakukan di pedesaan, tetapi kajian kemiskinan di pedesaan masyarakat adat masih terbatas. Kajian ini bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan dengan menganalisis tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masyarakat lokal di Desa Lohiatala. Data dikumpulkan dengan metode survai dari 39 rumah tangga yang ditentukan secara *simple random sampling*. Disamping itu, data dikumpulkan dari diskusi kelompok fokus yang partisipannya ditentukan secara sengaja. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga adalah Rp 12,6 juta per tahun dimana 68% bersumber dari usaha non pertanian dan sisanya 32% dari usaha pertanian. Dalam hal ini angka kemiskinan hampir tiga kali lipat angka kemiskinan provinsi yakni 67% dimana 23% tergolong miskin, 23% berikutnya termasuk paling miskin dan sisanya sekitar 21% tergolong melarat. Lebih jauh, 62% pengeluaran rumah tangga ternyata dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Strategi pengentasan kemiskinan pada rumah tangga miskin di Desa Lohiatala disarankan fokus pada mengintensifkan dan mengintegrasikan usaha cengkeh, pala dan kelapa dengan ternak.

Kata Kunci: Kemiskinan, rumah tangga pedesaan, pendapatan dan pengeluaran

ANALYSIS OF HOUSEHOLD INCOME AND POVERTY IN RURAL MALUKU (A CASE STUDY IN LOHIATALA VILLAGE, WESTERN SERAM, PROVINCE OF MALUKU)

ABSTRACT

Even though poverty studies have been done in several rural areas, it was little know about poverty research at original village in small islands Maluku. The objective of this study was to know poverty level by analysing income and expenditure of households at indigenous people of Lohiatala village, Western Seram of Maluku. Data was collected by using survey of 39 selected households which was determined by simple random sampling. Besides, data was also gathered by using focus group discussion where participants were determined purposively. Research result showed that average household income was Rp12.6 million/year whereas household expenditure was around Rp 10.6 million per year. Most of income or about 68% came from non farm activities and the rest 32% was obtained from agriculture. In line with this, of 62% of total expenditure was allocated for food and the other 38% was used to fulfill non food basic needs. In this term, poverty rate was calculated about 67% that could be categorized as of 23% poor, 23% poorest and 21% destitute. This suggested that poverty rate in rural Maluku was about three fold of poverty at provincial level. Intensified and integrated plantation and livestock farming systems was suggested as the main strategy to poverty reduction particularly in indigenous rural Maluku.

Key words: Poverty, household income analysis, plantation and livestock integration

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih tinggi di Indonesia, walau cenderung menurun yakni sekitar 14% dari sekitar 230 juta penduduk tahun 2009 menjadi 12,5% dari 237 juta penduduk tahun 2010. Jumlah nominal kemiskinan umumnya lebih besar di Kawasan Barat Indonesia

khususnya Jawa dan Sumatera sedangkan persentase kemiskinan lebih tinggi di Kawasan Timur Indonesia seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 75% diantaranya adalah petani tanaman pangan (Arifin, 2007) sehingga pembangunan daerah seharusnya dimulai dari desa (Chambers, 1983).

Kenyataannya pembangunan daerah cenderung bias kota sehingga masyarakat desa harus menghadapi sendiri masa cerah dan masa suram dalam merespon perubahan sosiobudaya, ekonomi khususnya yang bersumber dari lingkungan eksternal seperti krisis ekonomi (Bremen & Wiradi, 2004), konflik sosial dan program pembangunan yang salah sasaran. Maluku merupakan salah satu provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia dimana persentase penduduk miskin lebih dari dua kali lipat angka persentase kemiskinan nasional. Pembangunan transmigrasi di Maluku juga memiliki masa suram untuk mewujudkan tujuan pemerataan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di daerah sekaligus menjadi *trigger* pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan pada desa masyarakat lokal.

Desa transmigrasi Waimital yang dimulai sejak tahun 1954 dan Waihatu sejak tahun 1973/1974 merupakan dua kawasan transmigrasi di Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang hidup berbatasan langsung dengan desa-desa atau negeri masyarakat adat setempat seperti Desa Lohiatala selama lebih kurang 40 tahun. Setelah lebih kurang 40 tahun hidup di daerah baru dan hidup berdampingan dengan desa-desa tetangga, desa transmigrasi tampak secara visual jauh lebih maju dibanding desa non transmigrasi. Indikator kemajuan desa transmigrasi antara lain sarana dan prasarana dasar, perumahan, jalan-jalan usahatani serta berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa transportasi dan komunikasi. Kesenjangan ekonomi dan sarana prasarana fisik kelihatannya jauh lebih baik di desa transmigrasi dibandingkan di desa non transmigrasi.

Namun demikian, penelitian di Desa transmigrasi Waihatu tahun 1996 telah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi di pedesaan Maluku, baik di dalam desa transmigrasi maupun antara desa transmigrasi dan desa non transmigrasi atau kini disebut negeri masyarakat adat (Girsang, 1996; 1997). Kesenjangan ekonomi yang tampak secara fisik dalam bentuk rumah, sarana prasarana fisik dan keberhasilan usaha pertanian lebih bersifat sensitive. Hal ini dapat mendorong timbulnya kecemburuan sosial yang mempercepat munculnya kesenjangan sosial budaya yang ditindaklanjuti dengan isu etnik dan agama. Kerusakan sosial tahun 1999-2004 di Maluku merupakan salah satu argumentasi bahwa kesenjangan sosial ekonomi dan budaya yang cukup laten sangat mudah diprovokasi menuju konflik sosial yang nyata atau manifest. Masalahnya, tujuan awal transmigrasi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga transmigran melalui perbaikan pendapatan rumah tangga, ternyata justru masih menciptakan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di lokasi transmigrasi.

Kajian mengenai analisis pendapatan rumah tangga dan kemiskinan di desa masyarakat adat Lohiatala yang berdampingan langsung dengan desa transmigrasi masih jarang dilakukan di Maluku.

Sejauhmana dampak kehadiran desa transmigrasi terhadap kemiskinan dan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga pada masyarakat lokal belum banyak diteliti sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan. Tingkat kemiskinan dimaksud adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non pangan (Tjondronegoro dkk., 1996) yang dapat diukur dari tingkat pendapatan atau pengeluaran rumah tangga serta persepsi masyarakat yang beragam sesuai dengan latar belakang dan konteks orang yang melihatnya.

Pendapatan rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan pendapatan kepala rumah tangga. Pendapatan kepala rumah tangga seringkali mengabaikan sumber-sumber pendapatan dari istri dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya baik dari usaha pertanian maupun luar pertanian, termasuk kiriman dari anak atau sanak saudara. Oleh karena itu pendapatan rumah tangga menjadi penting sebagai ukuran yang lebih obyektif dalam menghitung pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di daerah pedesaan.

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Mengetahui sumber-sumber pendapatan dan tingkat pendapatan rumah tangga penduduk Desa Lohiatala baik dari pertanian maupun non pertanian; 2) Mengetahui tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Desa Lohiatala; dan 3) Mengembangkan model yang relevan untuk pengentasan kemiskinan di desa masyarakat adat sehingga dalam jangka panjang tercipta harmoni sosial melalui pembangunan yang lebih adil dan merata (*peace through development*).

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian telah ditentukan di Desa Lohiatala sebagai salah satu desa masyarakat adat di Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa ini berdekatan dengan lokasi transmigrasi Waimital yakni desa transmigrasi pertama di Maluku-bersamaan dengan tahanan politik di Pulau Buru, dan desa transmigrasi Waihatu, desa transmigrasi kedua pada tahun 1973/1974 di Pulau Seram. Dalam tulisan ini, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga dan sumberdaya, maka lokasi kajian ditentukan hanya di satu desa yakni desa non transmigrasi Lohiatala.

Responden penelitian ini adalah rumah tangga yang tinggal di Desa Lohiatala. Pada tahap awal dilakukan observasi lapang guna mengenali kondisi alam dan konteks sosial budaya di desa. Pada tahap ini diuji coba beberapa kuesioner untuk ditanyakan kepada sejumlah rumah tangga. Hasil dari observasi lapang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun instrumen kuesioner penelitian dengan beragam metode, yakni survai, diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion*, FGD) dan observasi. Responden penelitian survai ditentukan dengan cara *simple random sampling* berdasarkan kerangka sampling yang telah dipersiapkan di tingkat desa, sedangkan peserta FGD dan studi kasus dipilih secara sengaja. Jumlah

sample adalah 39 rumah tangga. Peserta FGD sekitar 10-15 partisipan dipilih dari berbagai latar belakang yang terkait dengan program kemiskinan seperti aparat desa, guru, staf kesehatan, petani dan kepala rumah tangga. Instrumen yang dipergunakan antara lain kuesioner terbuka dan terstruktur untuk menggali data melalui *in-depth interview* serta dilengkapi pertanyaan penuntun dalam kegiatan FGD dan studi kasus. Prinsip metode yang dipakai adalah prinsip triangulasi yang mengutamakan beragam pendekatan, metode, peneliti, perspektif teori dan interpretasi.

Data primer yang telah dikumpulkan kemudian diedit dan dirapikan sebelum melakukan diolah dan ditabulasi. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabulasi silang dan frekwensi untuk dijadikan acuan dalam melakukan interpretasi dalam penulisan laporan. Disamping data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa data kependudukan dan sumberdaya alam dari kantor pemerintah desa dan kecamatan serta instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi maupun dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Struktur pendapatan rumah tangga yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber-sumber pendapatan yang menjadi dasar penopang pendapatan rumah tangga di desa non transmigrasi selama bertahun-tahun, sesuai dengan kondisi alam dan sosiobudaya masyarakat setempat. Hal ini penting karena memperbaiki pendapatan rumah tangga melalui introduksi komoditas atau usaha yang sama sekali baru akan lebih sulit dibanding memperbaiki usaha yang sudah ada berbasis sumberdaya dan budaya lokal. Struktur dasar pendapatan rumah tangga di desa non transmigrasi adalah berbasis pada usaha pertanian dan non pertanian. Pada prinsipnya, usaha non pertanian akan lebih kuat dan berkelanjutan jika dibangun diatas landasan usaha pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

Analisis Sumber Pendapatan Usaha Pertanian

Secara teoritis struktur pendapatan rumah tangga miskin lebih didominasi oleh usaha pertanian dibanding usaha luar pertanian yang hanya sebagai pelengkap pendapatan yang berasal dari pertanian. Kenyataannya, sumber pendapatan pertanian dan luar pertanian mempunyai peran yang saling melengkapi sehingga mempunyai arti yang sama penting bagi rumah tangga di pedesaan, bahkan pendapatan non pertanian lebih dominan dalam menunjang kehidupan masyarakat di Desa Lohiatala.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Lohiatala adalah Rp.

12.617.340 pertahun dimana 68% berasal dari luar pertanian dan 32% sisanya dari usaha pertanian. Struktur pendapatan tersebut yang menggambarkan dominasi non pertanian, secara teoritis, kemungkinan merupakan indikasi bahwa transformasi ekonomi masyarakat di pedesaan sedang berlangsung dari struktur berbasis pertanian ke non pertanian. Namun hal ini masih perlu ditelusuri lebih jauh apakah struktur pendapatan non pertanian tumbuh kuat dan berkelanjutan serta berakar pada kekayaan sumberdaya dan budaya lokal atau disebabkan faktor eksternalitas semata.

Ditinjau dari sisi usaha pertanian ternyata ada dua komoditi penting yang memberikan kontribusi utama terhadap pendapatan rumah tangga yakni tanaman pangan (40%) berupa umbi-umbian disusul sagu dan jagung serta tanaman perkebunan (40%), khususnya cengkeh, kelapa dan mayang (enau). Umbi-umbian dan jagung merupakan tanaman pangan yang dikelola secara subsisten karena sebagian besar hanya untuk tujuan konsumsi anggota keluarga. Berbeda dengan tanaman pangan, cengkeh dan kelapa merupakan dua komoditas sumber penghasil uang tunai bagi penduduk di Desa Lohiatala. Disamping itu ternak sapi dan cabe mempunyai arti penting karena menyumbang masing-masing sekitar 5% dan 3% terhadap total pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian.

Pada dasarnya sudah sejak lama, tanaman pangan umbi-umbian, sagu dan jagung telah menjadi sumber pangan pokok masyarakat Lohiatala, sedangkan tanaman perkebunan seperti cengkeh, kelapa dan pala merupakan sumber pendapatan tunai rumah tangga. Proses globalisasi perdagangan, monetisasi dan komersialisasi serta revolusi teknologi dan informasi oleh nilai-nilai kapitalisme, mulai dari kapitalis-metropolitan hingga kea gen-agennya di tingkat lokal, telah merasuk hingga ke rumah tangga di daerah pedesaan sehingga kebutuhan akan uang (nilai materialisme) dan berdampak terhadap pelemahan social capital (Pretty & Ward, 1999; Pretty & Frank, 2000). Penduduk desa semakin mengharapkan kualitas hidup yang lebih baik khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan keluarga. Komersialisasi dan monetisasi melalui teknologi dan informasi melalui efek demonstrasi dan promosi produk baru telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat desa kearah pola konsumsi yang ditawarkan pasar lokal dan global.

Dalam hal ini ada perubahan orientasi dari subsistensi dimana produksi hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota rumah tangga kearah komersialisasi dan konsumerisme. Dalam hal ini uang menjadi target yang harus diraih untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anggota keluarga yang semakin beragam, mulai dari kebutuhan primer seperti konsumsi pangan, pendidikan dan kesehatan hingga kebutuhan rekreasi, transportasi, harga diri dan kebebasan mengaktualisasikan diri serta kebutuhan sekunder lainnya.

Tabel 1. Sumber pendapatan rumah tangga menurut jenis usaha di Negeri Lohiatala

Jenis usaha pertanian	Pertanian (P)		Jenis usaha non-pertanian	Non Pertanian (NP)	
	Rp	%		Rp	%
1. Tanaman pangan	1.630.744	40,25	1. Industri RMT	2.006.154	23,42
Padi	0	0,00	Mebel	0	0,00
Umbi-umbian	1.128.179	27,84	Pegawai	342.051	3,99
Jagung	200.000	4,94	Jahit	0	0,00
Sagu	302.564	7,47	Tukang-Buruh	1.664.103	19,43
Sukun	0	0,00	Industri pengolahan	0	0,00
2. Hortikultura sayur	263.641	6,51	2. Perdagangan	2.725.641	31,82
Kc panjang			Roti, kayu bakar, papalele	371.795	4,34
Tomat	18.462	0,46	Kios	230.769	2,69
Cabe	107.692	2,66	Hasil olahan pertanian (kayu)	2.123.077	24,79
Terong	1.333	0,03	3. Jasa	1.418.205	16,56
Daun ubi kayu	7.692	0,19	Sewa	15.385	0,18
Lainnya	118.462	2,92	Remittance	706.667	8,25
3. Buah-buahan	242.500	6	Angkutan ojek	696.154	8,13
Pisang	234.295	6	4. Gaji-PNS	2.415.641	28,20
Mangga	513	0,01			
Jeruk manis	7.692	0,19			
4. Tan perkebunan	1.634.045	40,33			
Mayang	192.308	4,75			
Kakao	24.795	0,61			
Pala	41.316	1,02			
Cengkeh	712.635	17,59			
Kelapa	664.051	16,39			
5. Peternakan	280.769	6,93			
Sapi	215.385	5,32			
Anjing	60.256	1,49			
Ayam buras	5.128	0,13			
Total Pertanian (Rp)	4.051.699		Total Non pertanian	8.565.641	12.617.340
Total Pertanian (%)	32,11		Total Non Pertanian (%)	67,89	100

Perubahan orientasi tersebut dapat diinterpretasi dari beberapa alasan. Pertama, hal penting dan menarik diperhatikan dari usaha pertanian adalah bahwa sejak lama basis ketahanan pangan penduduk Lohiatala adalah tanaman pangan non beras, tetapi pangan pokok saat ini cenderung diperjualbelikan di pasar untuk memperoleh pendapatan rumah tangga termasuk membeli pangan pokok beras. Atinya umbi-umbian, sagu dan jagung yang sebelumnya menjadi pangan pokok anggota rumah tangga kini tidak dijadikan sebagai makanan pokok anggota keluarga tetapi lebih cenderung dijual ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok termasuk beras. Salah satu penyebabnya adalah perubahan gaya hidup yang menganggap bahwa pangan beras lebih superior dan memiliki status sosial yang lebih tinggi disbanding pangan lokal.

Kedua, perubahan persepsi masyarakat pedesaan bahwa pangan beras sebagai komoditas lebih 'superior' dibanding umbi-umbian yang dianggap sebagai komoditas pangan 'inferior' telah mendorong konsumsi beras semakin tinggi dan penurunan konsumsi pangan lokal. Hal ini sering tersirat dari

sebutan masyarakat lokal terhadap pangan umbi-umbian sebagai 'makanan tanah', suatu istilah yang kurang populer dan kurang disukai tetapi sebenarnya mengandung makna sebagai makanan organik. Persepsi lain juga tersirat dari pernyataan ibu rumah tangga yang lebih memprioritaskan anak-anaknya mengkonsumsi beras karena dianggap lebih bergizi dan bergengsi, walaupun harganya lebih mahal. Bahkan tamu dari luar desa lebih sering ditawarkan nasi dibanding pangan non beras karena adanya persepsi beras-superior dan non beras-inferior. Hal ini menjadi tantangan program diversifikasi pangan dan percepatan pencapaian target program ketahanan pangan nasional surplus 10 juta ton beras tahun 2014 dimana salah satu strateginya adalah mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras yang di Indonesia telah mencapai 139 kg/kapita per tahun dengan mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal. Gerakan atau aksi perubahan pola makan dengan mengubah *mind set* masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif (Chamala *et al.*, 1999; Girsang, 2009) yang dimulai dari pejabat pemerintah

dan tokoh masyarakat serta masyarakat Maluku untuk mengkonsumsi pangan local seperti 'enbal' di Maluku Tenggara dan 'papeda' di Maluku Tengah maupun 'jagung-kacang-nasi' di Maluku Barat Daya.

Ketiga, usaha ternak sapi dan hortikultura seperti cabe dan sayur lainnya merupakan mata pencaharian baru dalam budaya penduduk Lohiatala. Usaha tersebut diamati, ditiru dan dimodifikasi dari budaya masyarakat transmigran yang mengandalkan ternak untuk membajak sawah sekaligus investasi atau tabungan keluarga. Berbeda dengan ternak yang membutuhkan waktu lama, usaha sayur-sayuran bertujuan untuk menghasilkan uang karena perputarannya lebih cepat dibanding ternak dan tanaman tahunan. Penduduk Lohiatala tidak memiliki sawah dan tidak terbiasa menggunakan ternak sapi untuk mengolah lahan kering, sehingga sapi masih dipelihara secara ekstensif untuk tujuan memperoleh pertambahan daging dan atau anak. Namun demikian, motivasi dan ketrampilan memelihara ternak sapi masih terkesan kurang intensif dikalangan penduduk Lohiatala jika dibandingkan dengan peternak transmigran. Hal yang sama juga tampak dari pola usaha sayur-sayuran yang ditanam spradis, tersebar dan skala kecil tanpa perawatan intensif. Hal ini merupakan adaptasi budaya dari pola pertanian perkebunan yang relatif masa panennya lebih panjang (6 bulan atau tahunan) ke pola pertanian sayur-sayuran yang musim panen jauh lebih pendek (bulanan atau tiga bulanan).

Jika diamati di lapangan maka apa yang terjadi dalam usaha pertanian di desa non transmigrasi sedang mengalami kegalauan dan dipersimpangan jalan: disatu sisi terpengaruh dan hendak mengikuti pola pangan dan usaha pertanian di lokasi transmigrasi tetapi belum siap secara teknis, bisnis dan budaya, sedang disisi lain sedang meninggalkan pola pangan pokok asli dan usaha pertanian yang lama tetapi belum sepenuhnya terjadi. Masalahnya proses perubahan ini sering tanpa disadari baik penduduk non transmigrasi-terutama generasi muda. Lebih lanjut pemerintah bahkan membuat kebijakan dan program yang menganggap model usaha dan pola budaya transmigrasi lebih 'maju' dan dijadikan sebagai model yang harus diikuti dan ditiru oleh masyarakat adat non transmigran.

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa masyarakat Lohiatala dan desa-desa lokal lainnya memiliki akar budaya pada pola pangan non beras dan perkebunan kelapa, cengkeh dan pala. Pola pertanian masyarakat adat memiliki karakteristik geografis berbukit-bergunung, mengandalkan pangan non beras yang ditanam tersebar dalam skala kecil serta tanaman perkebunan yang jauh dari lokasi desa sebagai sumber pendapatan musiman. Pola nafkah beragam (*occupational multiplicity*) sebagai sumber pangan sekaligus uang tunai (Bastiesen *et al.*, 2005). Berbeda dengan pola pertanian padi sawah dan sayur-sayuran di desa transmigrasi, pola pertanian di desa transmigrasi

adalah ekologi agroforestry tradisional (Stubenvoll, 2001) dengan pola 'dusung' dimana ada campuran tanaman perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan. Jika memahami hal ini maka kebijakan dan program pembangunan di desa non transmigrasi harus disesuaikan dengan kondisi sosiobudaya dan teknologi yang adaptif dengan kondisi geografis setempat yakni dengan mendorong perubahan orientasi pertanian dari pola konvensional kearah agribisnis tanaman perkebunan (Saragih, 2011). Lebih jauh, usaha ternak yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan perlu dioptimalkan dan diintegrasikan dengan usaha pertanian dalam bentuk integrasi sistem usaha tanaman dan ternak (*crop-livestock farming systems*) untuk mengurangi risiko usaha dan memperluas akses pendapatan (Girsang, 2009), ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Usaha yang mungkin dikembangkan adalah usaha peternakan khususnya sapi dan ayam kampung. Kedua usaha ini lebih cenderung memiliki nilai jual yang tinggi. Disamping itu usaha peternakan sapi dan ayam lebih relevan bagi penduduk Desa Lohiatala karena tidak sulit memeliharanya dan masih terdapat potensi areal lahan penggembalaan sapi yang cukup luas pada lahan tanaman perkebunan kelapa. Petani juga dapat menghasilkan pupuk kompos dari usaha peternakan tersebut untuk digunakan sebagai pupuk tanaman sayur-sayuran.

Jadi fokus pembangunan pertanian di Desa Lohiatala adalah tanaman perkebunan khususnya kelapa, cengkeh dan pala, sedangkan tanaman umbi-umbian juga sama pentingnya untuk dijadikan sumber ketahanan pangan rumah tangga. Kecuali itu, ternak sapi dan ayam serta tanaman sayur-sayuran menjadi usaha pertanian yang memiliki peran penting dalam perbaikan pendapatan rumah tangga di Desa Lohiatala. Masalahnya usaha perkebunan, tanaman pangan dan peternakan belum dikelola secara intensif sehingga produksinya masih rendah. Lebih dari itu, komoditas yang dihasilkan belum diolah dengan menggunakan teknologi baru sehingga nilai tambahnya masih rendah. Perbaikan produksi dan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk pertanian tersebut akan sulit terwujud tanpa penciptaan generasi baru petani yang memiliki ketrampilan teknis dan bisnis. Hal ini hanya dapat terwujud jika terjadi kemitraan yang saling menguatkan dan menguntungkan antara petani pengusaha dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi serta pemerintah yang memberikan kebijakan terkait infrastruktur, lembaga keuangan/perkreditasi sumber pemberi modal pinjaman (*microfinance*) serta lembaga pemasaran yang dijumpai oleh para penyuluh polivalen yang profesional di tiap kawasan pengembangan desa.

Oleh karena itu penduduk desa lebih praktis membuat minuman beralkohol dari pohon mayang atau enau yang sering disebut 'sopi' sebagai salah satu

sumber penghasilan masyarakat dari generasi ke generasi. Pemerintah daerah sering melihat mata pencaharian ini sebagai 'illegal' tetapi sudah menjadi bagian hidup masyarakat yang memiliki sumberdaya alam pohon enau dan kelapa yang cukup melimpah, sehingga sulit untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tidak resmi.

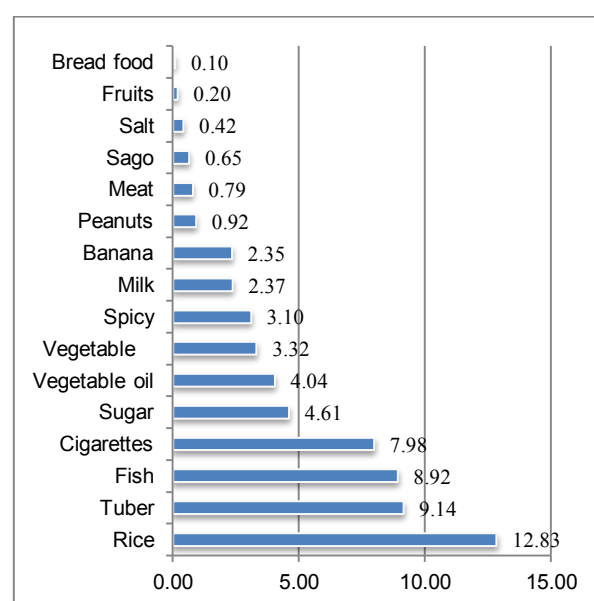
Dalam semua itu, kebijakan dan program pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat adat seharusnya berbasis sumberdaya alam pertanian pangan non beras dan perkebunan serta industri pengolahannya. Hal ini merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) pembangunan ekonomi di Desa Lohiata dengan teknologi yang relevan, adaptif dan berkelanjutan. Jika tidak maka generasi penerus di desa akan mengalami kehilangan arah pembangunan sehingga hanya akan meningkatkan pengangguran, urbanisasi, kecurigaan dan ketidakpercayaan (*distrust*) serta kecemburuan sosial yang pada akhirnya menjadi pemicu konflik sosial ekonomi.

Analisis Sumber Pendapatan Usaha Non Pertanian

Jika dianalisis sumber pendapatan luar pertanian maka kontribusi terbesar berasal dari perdagangan (32%), gaji pegawai (28%), industri kecil (24%) serta jasa dan *remittance* (16%). Kegiatan usaha perdagangan yang memiliki kontribusi terbesar adalah berdagang kayu yakni memotong kayu di dihutan desa dengan menggunakan *chainsaw* dan kemudian menjualnya ke pasar-industri pengolahan dan perdagangan kayu, usaha mebel atau toko-toko bahan bangunan. Oleh karena *chainsaw* merupakan barang yang cukup mahal yang nilainya hingga Rp10 juta per unit maka tidak jarang pemilik modal yang sekaligus pedagang kayu menyewakan *chainsaw* ke penduduk desa yang mau bekerja memotong dan menjual kayu. Usaha ini hampir dapat disebut *illegal cutting* karena dalam jangka panjang akan menggundul hutan rakyat di pedesaan yang sebenarnya berperan penting menjaga stabilisasi iklim mikro, daerah tangkapan air serta mengatur tata aliran air termasuk air sungai untuk kebutuhan air irigasi yang sangat penting untuk petani lahan sawah di daerah hilir.

Sumber pendapatan terpenting kedua dari non pertanian di desa non transmigrasi adalah gaji yang diperoleh dari pegawai negeri, pensiunan dan karyawan swasta. Jumlah mereka yang diterima bekerja sebagai pegawai negeri khususnya guru sekolah maupun pensiunan dan karyawan swasta sangat terbatas di pedesaan tetapi tingkat pendapatan mereka turut mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan. Singkatnya, pendapatan dari gaji memang cukup nyata mempengaruhi pendapatan rumah tangga tetapi oleh karena lapangan kerja sangat terbatas maka tidak disarankan menjadi lapangan pekerjaan utama di pedesaan.

Kecuali itu, gaji pegawai negeri merupakan uang berasal dari pemerintah (di luar desa), disatu sisi dapat meningkatkan konsumsi produk lokal, tetapi disisi lain juga belum tentu terkait erat dengan pengembangan usaha atau perekonomian di pedesaan karena hanya dinikmati oleh minoritas rumah tangga yang pola pengeluarannya kemungkinan lebih terkait dengan ekonomi kota. Jadi pekerjaan sebagai pegawai negeri dan pensiunan, walaupun berpengaruh nyata terhadap pendapatan rumah tangga di pedesaan, namun secara kualitatif kurang mendorong pemerataan tetapi kemungkinan lebih menciptakan kesenjangan pendapatan antar golongan yang dapat memicu rendahnya *trust* dan kecemburuan sosial dan budaya.

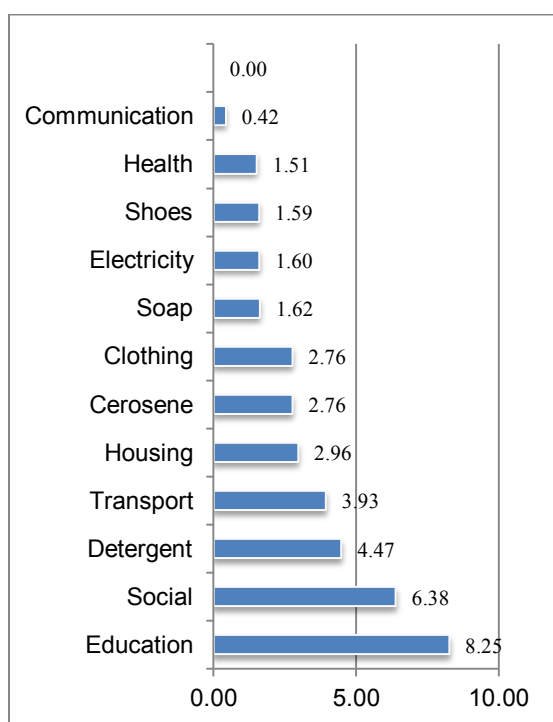


Gambar 1. Struktur pengeluaran pangan rumah tangga di Desa Lohiata

Sumber pendapatan dari industri lebih banyak dari kegiatan sebagai tukang bangunan, buruh bangunan dan buruh pikul kayu yang dijual ke industri pengolahan kayu. Pekerjaan ini sangat tergantung dari ketersediaan hutan kayu di pedesaan yang seharusnya perlu dilindungi guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Pekerjaan sebagai tukang dan buruh bangunan pun tidak banyak ditemukan di desa dan sangat tergantung dari adanya order atau pesanan. Penghasilan mereka cukup berarti untuk mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan, namun demikian jenis pekerjaan ini hanya akan sensitif lingkungan, relatif tidak menentu karena tergantung proyek dan pesanan, serta kemungkinan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Jasa yang berkembang di pedesaan non transmigrasi adalah transportasi ojek karena angkutan umum yang sangat terbatas jumlah dan frekuensinya ke Desa Lohiata yang lokasinya sekitar 5 km dari jalan utama. Oleh karena itu ojek menjadi lapangan pekerjaan baru baik untuk mengangkut anak-anak

sekolah maupun mereka yang perlu ke jalan utama atau ke pasar. Namun demikian, ongkos ojek masih mahal menurut warga desa sehingga dalam jangka tidak terlalu lama maka ojek akan tersaingi oleh angkutan umum yang ongkosnya lebih murah atau menjadi kurang laku karena keterbatasan daya beli masyarakat sehingga membatasi diri untuk keluar desa. Oleh karena itu pendapatan dari usaha ojek juga memiliki ketidakpastian atau tidak menentu (*uncertainty*). Salah satu sumber pendapatan yang cukup berarti bagi rumah tangga di pedesaan non transmigrasi adalah *remittances* yakni kiriman uang dari anak-anak yang telah bekerja di kota atau daerah lain. Pengiriman uang pada prinsipnya bulanan tetapi yang sering terjadi adalah tidak menentu, sehingga sumber pendapatan dari remittance juga tidak bisa diharapkan berkelanjutan.



Gambar 2. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non pangan

Berbeda dengan sumber pendapatan pertanian yang berbasis pada sumberdaya alam lokal, sumber pendapatan luar pertanian bersifat lebih sensitif lingkungan dan kurang berkelanjutan dalam jangka panjang karena bergantung pada sumberdaya hutan yang terbatas, kiriman dari anak, angkutan ojek (kecuali gaji pegawai negeri). Jasa transportasi sepeda motor (ojek) merupakan fenomena baru penciptaan lapangan kerja bagi sebagian besar generasi muda di desa dan kota. Jika hutan semakin banyak ditebang untuk kebutuhan kayu dan bangunan maka suatu hari hutan akan rusak dan tata air akan mengalami gangguan yang dapat berakibat buruk pada daerah hilir yakni lahan pertanian padi dan palawija yang dikelola

oleh masyarakat transmigrasi. Kecuali itu, jumlah pegawai negeri sangat terbatas dan tidak dapat dijadikan lapangan pekerjaan dimasa datang, demikian halnya dengan kiriman anak dan usaha ojek yang sifatnya tidak menentu.

Oleh karena itu, argumentasi bahwa pendapatan luar pertanian yang lebih besar dari pertanian sebagai indikasi adanya transformasi ekonomi pedesaan dari pertanian ke luar pertanian ternyata kurang memiliki fondasi yang kuat karena hampir semua jenis usaha luar pertanian tersebut mengandalkan faktor luar desa dan sifatnya sensitif dan tidak menentu serta tidak berkelanjutan. Dalam hal ini ada benarnya bahwa pergeseran mata pencaharian dari pertanian ke sektor informal di desa dan kota yang cukup beragam tetapi memiliki ketidakpastian (van Oostenbrugge, 2004) tidaklah lebih baik dibanding upah atau pendapatan dari usaha pertanian di desa (Tambunan, 1995). Artinya pertanian masih dikelola dalam skala usaha dan modal investasi kecil dengan teknologi konvensional dan inovasi terbatas, sedangkan usaha informal di luar pertanian di desa dan kota tidak memberikan upah lebih baik dibandingkan upah di sektor pertanian. Fondasi usaha luar pertanian yang lebih kokoh terjadi jika usaha-usaha yang dibangun berbasis pada nilai tambah industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam lokal yang dikelola secara arif dan berkelanjutan.

Analisis Pengeluaran Pangan Dan Non-Pangan

Berbeda dengan pendekatan dari sisi produksi atau pendapatan, sisi pengeluaran merupakan cara lain untuk mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan. Berdasarkan hasil kajian lapang, rata-rata tingkat pengeluaran rumah tangga di Desa Lohiata adalah Rp. 10.651.218 per tahun, lebih rendah dari rata-rata pendapatan sekitar Rp. 12,6 juta per tahun. Perbedaan angka pendapatan dan pengeluaran dapat berarti bahwa secara umum jumlah rumah tangga di desa yang memiliki surplus lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga yang pas-ppasan atau kekurangan. Kenyataannya, sebagian besar (62%) pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan sisanya sebesar 38% dialokasikan untuk kebutuhan non pangan. Jika dilihat dari struktur pengeluaran pangan, maka pengeluaran terbesar adalah untuk membeli beras (13%) disusul konsumsi ubi-ubian dan ikan (9%), gula dan minyak goreng. Alokasi pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan menunjukkan indikasi penting bahwa sebagian besar rumah tangga di Desa Lohiata masih hidup dalam kemiskinan. Pola ini ternyata juga terjadi di pedesaan kabupaten Maluku Tenggara Barat (Fakultas Pertanian, 2007).

Hal menarik dalam struktur pengeluaran rumah tangga untuk pangan adalah semakin rendahnya tingkat konsumsi sagu dikalangan penduduk desa.

Sagu merupakan makanan pokok penduduk Maluku yang semakin tergeser oleh pangan beras. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula konsumsi beras dan dalam waktu bersamaan semakin menurun konsumsi sagu. Berbeda dengan sagu, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi rokok jumlahnya mencapai 8% dari total pengeluaran. Hal ini berarti nilai pengeluaran untuk rokok keala rumah tangga hampir sama dengan pengeluaran untuk pendidikan anak-anak. Nilai pengeluaran rokok tersebut adalah sekitar 4 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk kesehatan atau 8 kali lebih tinggi dibandingkan konsumsi daging. Hal ini dapat berarti bahwa alokasi pengeluaran untuk biaya kesehatan merupakan prioritas terakhir bagi rumah tangga di pedesaan.

Pendidikan dan kegiatan sosial merupakan dua prioritas dalam struktur pengeluaran rumah tangga di Lohiatala. Pendidikan masih dianggap sebagai salah satu atau satu-satunya peluang yang terbuka bagi penduduk desa khususnya rumah tangga miskin untuk melakukan mobilitas sosial guna memperbaiki tingkat pendapatan, kesejahteraan dan status sosial ekonomi. Berbeda dengan pendidikan, pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti keagamaan, pesta maupun saling membantu anggota keluarga, merupakan prioritas kedua bagi penduduk desa. Kegiatan sosial mempunyai arti penting sebagai asuransi sosial atau semacam *reciprocity* dikalangan penduduk di pedesaan Maluku. Dalam hal ini seseorang rela berkorban mengeluarkan biaya kegiatan sosial sebagai modal sosial yang diharapkan sebagai jaminan mendapatkan perlakuan yang sama dikemudian hari.

Prioritas pengeluaran berikut adalah deterjen untuk mencuci dan biaya transportasi. Desa Lohiata terletak di wilayah berbukit yang sulit mendapat air. Akibatnya nilai pengeluaran deterjen tergolong cukup besar untuk mencuci pakaian di sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari desa. Hal ini juga berimplikasi terhadap sulitnya mendapatkan akses terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak. Kecuali itu, Desa Lohiata sudah memiliki akses jalan tetapi biaya transportasi masih mahal karena rendahnya daya beli, mobilitas sosial dan rendahnya frekwensi angkutan yang masuk ke desa. Pelayanan dasar listrik desa masih terbatas pada malam hari sehingga dapat dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah untuk belajar.

Oleh karena akses listrik yang terbatas maka industri menjadi kurang berkembang di desa khususnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa, cengkeh dan pala, termasuk industri pengolahan pangan. Namun demikian, alokasi pengeluaran rumah tangga di pedesaan untuk sagu, umbi-umbian dan dalam batas tertentu sayur-sayuran sebenarnya dikeluarkan dalam bentuk natura bukan dalam bentuk uang tunai.

Tingkat Kesenjangan Dan Kemiskinan

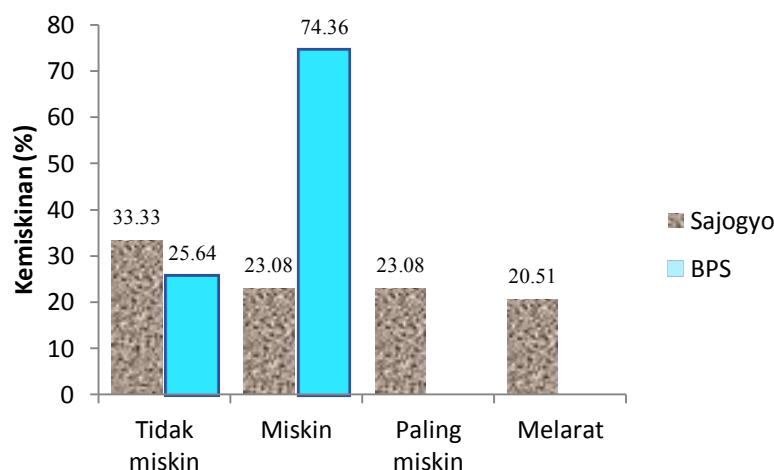
Jika ditinjau dari pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar Rp. 12,6 juta per tahun, tampaknya angka kemiskinan akan rendah. Namun tidak demikian halnya, sebab angka rata-rata tersebut berasal dari angka agregat penduduk desa yang terpilih sebagai responden sehingga perlu dilihat lagi secara spesifik berapa tingkat kesenjangan dan standar pendapatan perkapita per bulan.

Tingkat kesenjangan di Negeri Lohiatala tergolong moderat-tinggi (Tabel 2) dimana 40% berpendapatan terendah menguasai sekitar 16% total pendapatan. Idealnya 40% berpendapatan terendah menguasai lebih dari 18% total pendapatan. Kesenjangan terjadi karena persentase lapisan atas yang jumlahnya kecil menguasai asset dengan jumlah yang lebih besar, sedangkan sebagian besar penduduk yang tergolong lapisan bawah hanya menguasai sebagian kecil asset yang ada. Di Desa Lohiata, 40% lapisan bawah hanya menguasai 26% aset yang ada, sedangkan 20% lapisan atas menguasai 36% aset yang ada. Hal ini belum tergolong timpang tetapi tanpa intervensi yang tepat terhadap struktur pendapatan yang ada, maka terdapat kecenderungan arah ketimpangan ke tingkat yang lebih berat.

Jika dibandingkan antara 20% berpendapatan terendah yang menguasai 12% dengan 20% berpendapatan tertinggi yang menguasai hampir 36% maka nilai pendapatan 20% berpendapatan tertinggi hampir 3-4 kali lebih besar. Hal ini berarti ada ketimpangan penguasaan pendapatan. Walaupun tergolong memiliki tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang moderat, ternyata angka kemiskinan di Lohiatala masih tergolong tinggi sesuai dengan kriteria yang digunakan.

Tabel 2. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Negeri Lohiatala

Lapisan pendapatan	Total (Rp)	Interval (Rp. Jt)	Penguasaan tiap lapisan (%)	Tingkat kesenjangan
Lapisan 20% pertama	59.338.000	2,2-5,6	12,06	Moderat-tinggi
Lapisan 20% kedua	68.976.000	6,1-9,3	14,02	
Lapisan 20% ketiga	85.889.750	9,7-12,4	17,45	
Lapisan 20% keempat	102.139.166	12,4-16,4	20,76	
Lapisan 20% kelima	175.733.333	16,4-47,9	35,71	
Total	492.076.249		100,00	



Keterangan:

*) Kriteria garis kemiskinan dihitung berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga setara beras/kapita/tahun: a) Tidak Miskin >320 kg; b) Miskin 240-320 kg; c) Paling Miskin 180-239 kg; dan d) Melarat (destitute) < 180 kg.

**) BPS menetapkan batas (garis) kemiskinan berdasarkan tingkat pengeluaran sebesar Rp. 217559/kapita/bulan pada tahun 2009.

Gambar 3. Tingkat kemiskinan di Desa Lohiata menurut Kriteria BPS dan Sayogyo

Jika menggunakan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), maka tingkat kemiskinan di Desa Lohiata adalah 74%, hampir tiga kali lipat tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Angka ini sedikit menurun menjadi 67% jika menggunakan ukuran kemiskinan Sayogyo, tetapi meningkat tajam hampir 2,5 kali lipat jika menggunakan ukuran atau standar kemiskinan Bank Dunia yang bernilai US \$1.25 s.d US\$2/hari (World Bank, 2006). Ukuran tersebut perlu dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dasar minimum dan sesuai kondisi sosial budaya setempat. Masalahnya, penduduk di pedesaan masih memiliki kebun sendiri sebagai sumber pangan.

Perbedaan ukuran menimbulkan perbedaan angka kemiskinan. BPS mengukur kemiskinan menurut tingkat pengeluaran per kapita per bulan, sedangkan Sayogyo mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan per kapita setara beras 320 kg/kapita/tahun (Sayogyo, 1978). Berdasarkan ukuran Sayogyo yang memisahkan antara rumah tangga miskin, paling miskin dan melarat, maka program dan target kemiskinan dapat lebih fokus karena mengenali siapa prioritas kelompok sasaran (Perdana & Maxwell, 2004). Ukuran ini juga dinamis mengikuti perkembangan harga beras yang diprediksi berpengaruh nyata terhadap harga barang lain dan jumlah kemiskinan. Pada prinsipnya unit analisis garis kemiskinan Sayogyo bukanlah per kapita tetapi per rumah tangga karena satu rumah tangga pada umumnya bersama-sama memproduksi dan mengkonsumsi.

Berbeda dengan Sayogyo (1978), BPS mengasumsikan pengeluaran penduduk miskin menggambarkan tingkat pendapatan karena rumah tangga miskin diasumsikan tidak memiliki investasi dan tabungan. Kenyataannya, rumah tangga di

pedesaan memiliki variasi tingkat produksi, pendapatan dan pengeluaran untuk konsumsi sehingga pendekatan produksi atau pendapatan menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan konsumsi atau pengeluaran. World Bank (2006) bahkan menetapkan standar lebih tinggi yakni US \$2/kapita/hari.

Jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang cukup besar dalam satu rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu kemiskinan. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan seharusnya terintegrasi dengan program keluarga berencana di pedesaan. Disamping pendekatan pendapatan dan pengeluaran, kemiskinan sebenarnya bersifat multi dimensi (Sumarto & Wydianti, 2008) sehingga memerlukan variabel yang lebih luas meliputi kesehatan dan pendidikan serta aspek standar hidup lainnya. Terlepas dari perdebatan ukuran garis kemiskinan, pada prinsipnya indikator kemiskinan tidak sulit untuk diidentifikasi seperti pekerjaan dan pendapatan yang tidak menentu, kondisi rumah yang tidak layak, bahkan munculnya kawasan rumah kumuh, pengemis dan pekerja anak yang menjadi salah satu fenomena kemiskinan perkotaan (Harris, 1989; Harris-White, 2005). Jika gagal dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa maka dampaknya adalah orang desa akan mencari nafkah ke kota dan kemiskinan akan meluas ke kota dan menciptakan kantong kemiskinan perkotaan. Di provinsi Maluku, kemiskinan perkotaan di kota Ambon tidak dapat dihindari dari masalah urbanisasi berlebih dimana arus perpindahan penduduk dari desa-desa di 10 kabupaten/kota lainnya ke kota Ambon semakin lama semakin tinggi sebagai akibat bias pemangunan ekonomi yang terpusat di kota Ambon.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Lohiata sedang mengalami transformasi ekonomi dan sosiobudaya yang cenderung meninggalkan akar budayanya, khususnya perubahan pangan pokok dan tanaman perkebunan, tetapi dalam waktu bersamaan belum siap mengadopsi dan memodifikasi budaya luar, khususnya praktek usaha pertanian sayur-sayuran dan usaha peternakan sapi yang umum dikenal pada usaha pertanian masyarakat transmigran. Teknologi usahatani padi sawah transmigran sama sekali tidak berdampak terhadap penduduk Desa Lohiata. Oleh karena itu, umbi-umbian, kelapa dan cengkeh serta ternak sapi dan dalam batas tertentu usaha sayur-sayuran merupakan 5 komoditas yang memberikan sumbangan penting terhadap pendapatan rumah tangga. Disamping itu, rumah tangga di Desa Lohiata memperoleh penghasilan dari non pertanian khususnya usaha pemotongan, pengolahan dan penjualan kayu, buruh bangunan dan jasa transportasi ojeg serta gaji pegawai negeri. Pendapatan non pertanian tersebut mempunyai kontribusi penting terhadap pendapatan rumah tangga.

Kecuali struktur pendapatan pertanian yang sedang berubah, penduduk Negeri Lohiatala menghadapi struktur pendapatan non pertanian yang juga tergolong rapuh karena tidak dibangun diatas fondasi usaha pertanian yang kuat, berskala ekonomi dan berkelanjutan. Rata-rata tingkat pendapatan rumah tangga mencapai Rp 12,4 juta per tahun tetapi mempunyai indikasi kesenjangan pendapatan yang cenderung meningkat sehingga tingkat kemiskinan masih tinggi yakni sekitar 66% atau tiga kali lebih besar dari angka kemiskinan provinsi Maluku. Hal ini memberikan makna bahwa angka kemiskinan tingkat provinsi adalah angka rata-rata yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan di pedesaan yang persentasenya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pentingnya melakukan terobosan paradigma baru pembangunan pedesaan Maluku yang terfokus dan memiliki lokus spesifik lokasi, yakni berbasis tanaman perkebunan dan industri pengolahannya yang terintegrasi dengan usaha peternakan sapi dan ayam diikuti pembangunan akses ke pemasaran hasil produk-produk pertanian dan peternakan. Tanaman perkebunan dan peternakan sapi menjadi sumber uang tunai dalam jangka waktu tahunan, sedangkan tanaman sayur-sayuran dan ternak ayam menjadi sumber uang tunai dalam kurun waktu musiman. Tanaman pangan menjadi sumber pangan dalam kurun waktu triwulan. Usaha tersebut berskala kecil tetapi melibatkan petani pengusaha produktif di desa-desa masyarakat adat ekonomi serta diikuti pengembangan tanaman pangan non beras dan berorientasi industri pengolahan pangan.

Rencana aksi yang dapat disarankan adalah membangun kawasan cengkeh, kawasan kelapa yang

terintegrasi dengan kawasan ternak berskala kecil untuk penduduk desa-desa adat. Hal ini diikuti dengan penguatan kelembagaan dan mutu sumber daya petani dengan memberikan pendampingan dan pelatihan teknis dan bisnis secara intensif dan berkelanjutan oleh penyuluh profesional di tiap desa. Tujuan program penanggulangan kemiskinan bukan menyentuh sebanyak mungkin penduduk miskin tetapi menjadi miskin lagi pada tahun berikutnya, sebaliknya, tujuan rencana aksi programnya adalah fokus menyentuh sebagian kecil penduduk miskin di desa dan mengubahnya menjadi rumah tangga tidak miskin pada tahun berikutnya secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan komitmen politisi dan pengambil kebijakan serta dukungan investasi dari lembaga keuangan serta investor swasta, termasuk lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Sebagai suatu proses pembangunan kelembagaan, maka pengentasan kemiskinan membutuhkan fasilitator untuk membangun dan melatih serta mendampingi petani pengusaha untuk memperbaiki ketrampilan teknis dan bisnis serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan politisi dalam bentuk regulasi serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial. Akhirnya, oleh karena masalah kemiskinan di desa terkait erat dengan masalah kemiskinan di kota maka solusi kemiskinan sebenarnya memerlukan kerjasama antara pemerintah kota dan desa, swasta dan masyarakat petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil penelitian ini tidak dihasilkan oleh pekerjaan individu tetapi berkat kerjasama dan partisipasi banyak institusi pemerintah, kolega, mahasiswa dan mereka yang bekerja di pedesaan transmigrasi dan non transmigrasi serta warga masyarakat desa penelitian. Terima kasih saya ucapkan kepada DP2M Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang telah membiayai penelitian ini melalui Hibah Kompetitif Sesuai Prioritas Nasional tahun 2010. Terima kasih juga kepada teman-teman sekerja dan mahasiswa saya yang turut membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bastiensen, J., T. De Herdt, & B. D'exelle. 2005. Poverty reduction as a local institutional process. *World Development* 33: 979-993.
- Chamala, S., J. Coutts, & C. Pearson. 1999. *Innovation Management: Participatory Action Management Methodologies for R,D,E & Industry Stakeholders*. Land and Water

- Resources, Research and Development Corporation. Canberra.
- Breman, J. & G. Wiradi. 2004. Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20. LP3ES dan KILTV-Jakarta.
- Chambers, R. 1983. Rural Development: Putting the Last First. UK: Longman-Harlow.
- Fakultas Pertanian Unpatti. 2007. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Agribisnis di Kecamatan Wertamrian dan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon.
- Girsang, W. 1996. Pola Penguasaan Lahan Dan Strategi Nafkah Rumah Tangga: Studi Kasus Di Desa Transmigrasi Waihatu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. [Tesis]. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Girsang, W. 1997. Kesenjangan di desa Transmigrasi. *Harian Nasional Kompas*, p.4. 23 Januari 1997. Kompas Jakarta.
- Girsang, W. 2009. Participatory learning in agricultural extension: Constraints, processes and strategies enhancing adoption of fasciolosis control in West Java-Indonesia. Lamber Publishing Company. Koln. Germany.
- Harris, J. 1989. Urban poverty and urban poverty alleviation. Urban poverty and urban poverty alleviation.
- Harris-White, B. 2005. Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia. *World Development* 33: 881-891.
- Perdana, A.A., & J. Maxwell. 2004. Poverty Targetting in Indonesia: Programs, Problems and Lessons Learned. CSIS Working Paper Series (WPE) 083, March 2004. <http://www.CSIS.org.id/papers/wpe083>.
- Pretty, J.N. & B.R. Frank. 2000. Participation and Social Capital Formation in Natural Resource Management: Achievements and Lessons. Pp. 178-188 in *Changing Landscapes-Shaping Futures*. Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia: International Landcare 2000.
- Pretty, J.N. & H. Ward. 1999. Social Capital and the Environment. *World Development*.
- Saragih, B. 2001. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor: Yayasan Mulia Persada Indonesia dan Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor.
- Sayogyo. 1978. Lapisan yang paling lemah di pedesaan Jawa. *Prisma* 4: 50-62.
- Stubenvoll, S. 2001. Traditional agroforestry and ecological, social and economic sustainability on Small Tropical islands: A Dynamic land-use systems and its potential for community-base development in Thioor and Rhun, Central Maluku, Indonesia. [PhD Dissertation]. Univ Teknik Berlin.
- Sumarto, S., & W. Widyanti. 2008. Multidimensional Poverty in Indonesia: Trends, Interventions and Lesson Learned. The Smeru Research Institute. Paper Presented at the 1st International Symposium on "Asian Cooperation, Integration and Human Resources" for Waseda University Global COE Program: Global Institute for Asia Regional Institute (GIARI), Tokyo, January 17-18, 2008.
- Tambunan, T. 1995. Forces Behind the Growth of Rural Industries in Developing Countries. A Survey of Literature and A Case Study from Indonesia. *Journal of Rural Studies* 11: 203-215.
- Tjondronegoro, S.M.P., I. Soejono, & J. Hardjono. 1996. Poverty in Indonesia. In Quilibria, M.G. (Editor), *Rural Poverty in Developing Asia*. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand. Manila: Asian Development Bank.
- van Oostenbrugge, J.A.E, W.L.T van Densen, & M.A.M. Machiels. 2004. How the uncertain outcomes associated with aquatic and land resource use affect livelihood strategies in coastal communities in the Central Moluccas, Indonesia. *Agricultural Systems* 82: 57-91.
- World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor. Washington D.C. The World Bank, dalam Arifin, B., 2007, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.